

BAB I

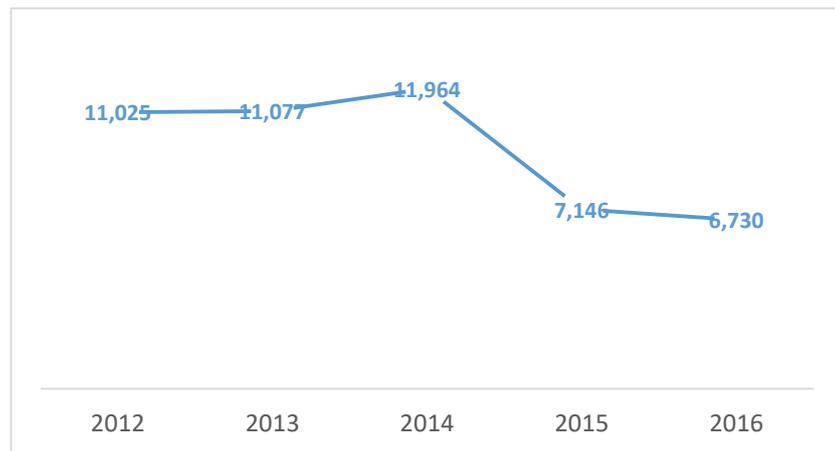
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harapan masyarakat agar terwujudnya *good corporate governance* dan penyelenggaraan organisasi sektor publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat tinggi sehingga, membutuhkan peningkatan peran dari pengawasan internal. Dalam penyelenggaraannya *good governance* tidak hanya ditunjukkan bagi pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga dituntut untuk melakukan *good governance* agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik di setiap lini pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu pengawasan yang cukup handal dalam pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penyelenggaraan pemerintahan dan dapat menjamin pendistribusian dana yang merata pada semua sektor publik sehingga efektivitas dan efisiensi penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, hasil yang didapatkan dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D), dan Badan Lainnya selama tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan bahwa pengawasan belum efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas audit BPK masih belum memadai.

Gambar 1 1
Permasalahan yang Berdampak Finansial Hasil Pemeriksaan BPK-
RI 2012-2016

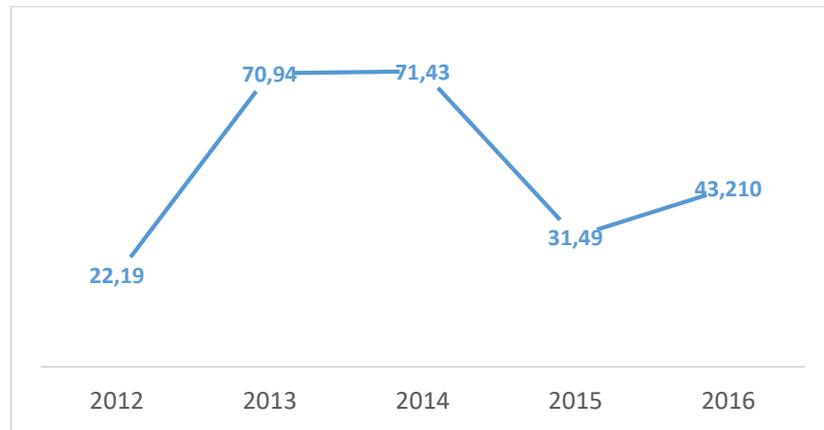


Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI (2012-2016)

Gambar 1.1 mengilustrasikan adanya kecenderungan naiknya jumlah permasalahan yang berdampak finansial dari temuan hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2012 sampai dengan 2014, tetapi pada tahun 2015 sampai dengan 2016 permasalahan yang berdampak finansial menurun.

Gambar 1 2

Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan BPK RI 2012-2016



Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI Tahun 2012-2016

Sedangkan Gambar 1.2 mengilustrasikan adanya kenaikan yang tajam pada nilai temuan pemeriksaan BPK selama tahun 2012 sampai dengan 2016, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan namun pada tahun 2016 mengalami kenaikan kembali.

Dengan demikian, BPK menilai bahwa kegiatan audit yang dilakukan oleh auditor pemerintah belum menggambarkan perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang tepat, pelaporan yang andal, dan perbaikan kualitas audit yang berkelanjutan (BPK, 2014). Sementara itu, kasus dugaan korupsi di tahun 2017 yaitu kasus suap BPK (Badan Pemerika Keuangan) yang melibatkan pejabat Eselon I BPK, Rochmadi Saptogiri dan auditor BPK, Ali Sadli. Mereka berdua ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara suap terkait dengan pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Mereka diduga menerima suap sebesar

240 juta dari mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDDT Sugito serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jenderal Kemendes PDDT Jarot Budi Prabowo (www.nasional.tempo.co).

Kualitas audit merupakan bagian yang sangat penting dalam menyajikan laporan hasil audit. Agar pemerintah puas dengan pekerjaan seorang auditor maka diperlukan sikap-sikap auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Hasil audit yang berkualitas akan menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah yang baik. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus di dukung dengan adanya seorang auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik, karena jika seorang auditor yang mempunyai kualitas yang rendah akan bisa memungkinkan terjadi kesalahan atau kecurangan saat mengaudit laporan keuangan, dengan demikian harus diperlukan seorang auditor yang baik agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Jika kemungkinan dalam memeriksa laporan keuangan auditor menemukan salah saji atau menemukan kecurangan yang terjadi dalam laporan keuangan, auditor tersebut harus melaporkannya sesuai apa yang terjadi sebenarnya.

Dalam suatu Negara pemerintah membutuhkan dana yang cukup besar untuk pengelolaannya, dan pemerintah dituntut untuk semakin transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan dana keuangan Negara. Dengan itu diperlukan pengawasan yang bagus dalam mengelola keuangan tersebut, diperlukan seorang yang handal dalam menjalankan pekerjaan atau tugasnya dan orang yang bertanggung jawab atas pengeluaran atau

penggunaan dana untuk keperluan pemerintahan. Dengan demikian auditor juga akan mampu menghasilkan laporan hasil audit yang berkualitas dan laporan audit secara wajar.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah jenis auditor eksternal, Auditor eksternal di Indonesia terdiri atas BPK dan BPKP adalah audit internal, pengertian BPK sendiri adalah lembaga tinggi Negara dalam system ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Letak perbedaannya dengan BPKP ialah auditor di BPK tugasnya memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang modalnya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sedangkan auditor di BPKP tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan pengurusan barang milik maupun kekayaan pemerintah daerah berdasarkan permintaan daerah. Audit eksternal adalah yang dilakukan oleh badan eksternal yang memenuhi syarat-syarat yang bertujuan menentukan apakah catatan akuntansi itu akurat dan lengkap, apakah disusun sesuai dengan ketentuan PSAK , dan

apakah laporan yang disiapkan dari data menyajikan posisi keuangan dan hasil usaha keuangan secara wajar.

Auditor dalam menjalankan tugasnya tidak harus membatasi diri hanya untuk melakukan pekerjaan profesi dan jabatannya, namun juga harus berjuang untuk mencari dan menegakkan kebenaran dan kesempurnaan tugas profesinya dengan melaksanakan semua tugas yang dibebankan kepadanya dengan sebaik mungkin dan sesempurna mungkin. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat An-Nahl ayat 90: *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat kebajikan”*, dan dalam Surat Al-Baqarah ayat 195: *“Dan berbuat baiklah. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang berbuat baik.”*

Pengalaman memberikan pengaruh pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit oleh karena itu diharapkan setiap keputusan yang telah diambil merupakan keputusan yang benar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin lama masa kerja yang dimiliki auditor, maka auditor akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Kompleksitas tugas yang dihadapi oleh seorang auditor akan menambah pengalaman serta pengetahuannya. Hal ini menunjukkan bahwa auditor yang tidak berpengalaman mempunyai tingkat kesalahan yang lebih signifikan dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Pengalaman yang lebih akan menghasilkan pengetahuan yang lebih. Pengalaman seorang auditor tentunya dapat berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor tersebut (Wardhani, 2013).

Setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin, hal ini dilakukan untuk memelihara serta meningkatkan kepercayaan publik. Tegas, jujur, dan adil dalam hubungan profesional dan bisnisnya merupakan prinsip dari integritas yang wajib dimiliki praktisi (Haryono, 2014). Integritas merupakan patokan bagi anggota dalam menguji seluruh keputusan yang telah diambil, serta merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik. Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa. Pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh disalahgunakan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip. Integritas mewajibkan kepada anggota untuk menaati baik bentuk ataupun jiwa standar teknis dan etika.

Selain itu agar menghasilkan kualitas audit yang baik, seorang auditor harus profesionalisme dalam menjalankan tugas atau pekerjaannya yaitu mengaudit laporan keuangan, dalam memeriksa laporan keuangan seorang audit tidak boleh melakukan kecurangan dengan alasan pribadi. Salah satu penyebab terjadinya kecurangan karena adanya seorang auditor yang tidak profesional dalam memeriksa laporan keuangan, dengan demikian agar menghasilkan kualitas audit diperlukan audit yang profesional dalam memeriksa laporan keuangan agar tidak terjadi kecurangan atau terjadi salah saji materil (Wardhani, 2013).

Agar tercapainya tujuan organisasi yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah dilakukan, karena efektivitas seorang pemimpin dapat diukur dari kinerja dan pertumbuhan organisasi yang dipimpinnya serta kepuasan karyawan terhadap pimpinannya, sehingga seorang pemimpin harus bisa mempengaruhi bawahannya untuk dapat melaksanakan tugas yang diperintahkan tanpa ada paksaan sehingga bawahan secara sukarela akan berperilaku dan berkerja sesuai tuntutan organisasi melalui arahan pimpinannya. Gaya kepemimpinan transformasional ini menegaskan pada pentingnya seorang pemimpin menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi para bawahan agar dapat berprestasi melampaui keinginannya (Sina, 2013).

Etika seorang auditor juga sangat mempengaruhi kualitas audit, seorang auditor yang mempunyai etika yang baik tentunya tidak akan berani melakukan tindak kecurangan dalam melakukan pemeriksaan atau menyajikan laporan keuangan. Etika sendiri berarti nilai - nilai atau norma - norma moral yang mendasari perilaku manusia, dengan itu seorang auditor harus menjunjung tinggi norma-norma tersebut. Etika yang pada dasarnya sangat berhubungan dengan moral yang menggambarkan ajaran baik lisan maupun tertulis. Kode etik merupakan etika yang dinyatakan secara tertulis atau formal. Pada saat auditor menjalankan praktik profesinya wajib mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor. Seorang auditor harus mempunyai etika yang baik agar mendapatkan kualitas audit yang baik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit

diantaranya adalah etika. Pelayanan jasa yang diberikan kepada masyarakat harus mempunyai kode etik, yang merupakan seperangkat prinsip-prinsip moral yang mengatur tentang perilaku profesional. Profesi akuntan tidak akan pernah ada tanpa adanya etika, karena fungsi akuntan merupakan penyedia informasi untuk proses pembuatan keputusan bisnis bagi para pelaku bisnis Agoes (2004) dalam Trihapsari dan Anisykurlillah (2016).

Pengakuan kualitas audit oleh lingkungan organisasi bergantung pada penegasan dan pembenaran hasil audit dan nilai yang diperoleh dari metodologi audit yang dilakukan (Herrbach, 2001). Standar, kode etik, dan petunjuk teknis audit merupakan prasyarat dasar yang diperlukan sebagai jaminan kualitas (*quality assurance*) di dalam proses audit (Karapetrovic dan Willborn, 2010) dalam Suharti *et al.* (2017). Pada dasarnya, proses audit merupakan upaya bersama setiap jenjang penugasan audit untuk memastikan kualitas pada setiap tahap dalam proses audit tersebut.

Terkait dengan topik penelitian ini, beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Samsi (2013) dalam penelitiannya membuktikan bahwa pengalaman kerja dapat mempengaruhi kualitas hasil audit secara signifikan. Menurutnya pengalaman dapat memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil dalam pelaksanaan audit sehingga diharapkan setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Dalam penelitiannya Bouhawia, *et all* (2015) membuktikan bahwa integritas berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Artinya, auditor yang memiliki integritas yang tinggi akan

menghasilkan audit yang berkualitas. Hal ini diperkuat pula dengan hasil penelitian dari Badjuri (2011) dan Arianti (2015). Dalam penelitiannya Agusti & Pertiwi (2013) membuktikan bahwa profesionalisme berpengaruh terhadap kualitas hasil audit dimana semakin tinggi tingkat profesionalisme auditor maka semakin baik kualitas audit yang dihasilkan. Hal ini diperkuat dengan penelitian Badjuri (2011) yang menemukan bahwa profesionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Gaya kepemimpinan juga dapat mengarahkan dan menghasilkan situasi tertentu pada lingkungan pekerjaan, seperti halnya kedisiplinan. Oleh sebab itu, seorang pemimpin bisa menjadi penentu berhasil atau tidaknya suatu tujuan audit atau organisasi secara menyeluruh. Penelitian oleh Saputra (2015) menunjukkan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Hal ini sejalan dengan penelitian Nuraini (2016) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja auditor dan berdampak pada kualitas audit yang dihasilkan. Etika auditor merupakan suatu sikap dimana seorang auditor dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung-jawab dengan cara wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan (Febriansyah *et al*, 2014). Menurut Halim (2008) ketaatan auditor terhadap kode etik yang terefleksikan oleh sikap independensi, obyektivitas, integritas dan lain sebagainya merupakan salah satu faktor yang cukup berpengaruh terhadap kualitas audit. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut

maka penelitian akan melakukan penelitian dengan judul “*Pengaruh Pengalaman Kerja, Integritas, Profesionalisme, dan Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi Studi Empiris di BPK Yogyakarta dan Jawa Tengah*”.

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan oleh Suharti *et al.* (2017). Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Suharti *et al.* (2017) yaitu terletak pada variabel yang digunakan serta sampel. Pada penelitian ini saya menambahkan variabel gaya kepemimpinan transformasional yang telah diteliti oleh Made (2016) untuk dianalisa pengaruhnya terhadap kualitas audit pada BPK. Gaya kepemimpinan transformasional sangat penting dalam mencapai kesuksesan sebuah organisasi dan pada kenyataannya masih terdapat karyawan ataupun auditor yang bekerja di BPK kurang mendapatkan dukungan dan perhatian oleh pimpinan sehingga berdampak kepada menurunnya kerja auditor. Sampel yang digunakan oleh penelitian Suharti *et al.* (2017) yaitu BPKP pada Provinsi Riau. Sedangkan penelitian ini menggunakan sampel BPK pada 2 Provinsi yaitu Yogyakarta dan Jawa Tengah, karena ingin mengetahui bagaimana kualitas audit pada BPK Yogyakarta dan Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih BPK daripada BPKP yaitu bahwa proses pengawasan yang dilakukan BPK belum efektif. Hal ini dibuktikan berdasarkan sumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2012-2016 pada permasalahan yang berdampak finansial atau merugikan Negara adanya kecenderungan naiknya permasalahan yang berdampak finansial dari temuan hasil

pemeriksaan BPK selama tahun 2012 sampai dengan 2014. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas audit BPK masih belum memadai.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat diturunkan rumusan masalah seagai berikut:

1. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Integritas berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?
3. Apakah Profesionalisme berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?
4. Apakah Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?
5. Apakah Etika Auditor dapat memoderasi Pengaruh Pengalaman Kerja, Integritas, Profesionalisme dan Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kualitas Audit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh integritas terhadap kualitas audit.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh profesionalisme terhadap kualitas audit.

4. Untuk menguji secara empiris pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kualitas audit.
5. Untuk menguji secara empiris etika editor memoderasi pengaruh pengalaman kerja, integritas, profesionalisme, gaya kepemimpinan transformasional terhadap kualitas audit.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya akan menunjukkan hasil yang mana diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Diharapkan mampu menambah ide, wawasan, gagasan dan pengetahuan mengenai kualitas audit pada BPK.

- b. Bagi BPK

Hasil peneliti ini, diharapkan dapat dijaikan motivasi agar para auditor di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah agar lebih profesional dalam melaksanakan audit agar menghasilkan audit yang berkualitas. Dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh pengalaman kerja, integritas, profesionalisme, dan gaya

kepemimpinan transformasional terhadap kualitas audit, sehingga pada hakekatnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para auditor untuk menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.